



LAPORAN PPID TRIWULAN I

Periode Januari-Maret

2024

Pusat Pengembangan
Kompetensi Manajemen

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik – Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Triwulan I Periode Januari-Maret Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi atas implementasi kegiatan publikasi yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen sebagaimana menjadi salah satu tugas tambahan dalam pengelolaan kegiatan di lingkungan Pusat. Bentuk kegiatan publikasi yang dilakukan meliputi publikasi secara digital maupun cetak yang menitikberatkan pada capaian kegiatan serta informasi-informasi terkait kegiatan pengembangan kompetensi sehingga khalayak selain dapat mengetahui kegiatan yang dilaksanakan juga ke depan dapat tertarik dan turut serta dalam mengikuti kegiatan dimaksud.

Pada laporan yang telah tersusun ini, kami menyadari terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan laporan berikutnya.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam peningkatan kinerja Petugas Layanan Informasi dalam melakukan penyajian informasi, kinerja dan peran Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan SDM - Kementerian PUPR dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi SDM PUPR melalui pelayanan informasi bagi publik.

Jakarta, Maret 2024

Pengarah PPID Daerah Tipe I
Kepala Pusbangkom Manajemen



Ir. Moch. Adam, MM

NIP. 196503031992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Maksud dan Tujuan.....	7
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
2.1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP	8
2.2. Kegiatan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP	9
2.3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik	12
2.4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik.....	16
2.5. Kondisi Layanan Informasi Publik.....	23
2.6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik.....	30
BAB III KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	42
BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Data Pekerjaan Pemohon Informasi Melalui e-PPID.....	13
Tabel 2 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui e-PPID BPSDM	13
Tabel 3 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui R. Layanan Informasi	13
Tabel 4 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui e-PPID PUPR	14
Tabel 5 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui e-PPID BPSDM	14
Tabel 6 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui R. Layanan Informasi.....	15
Tabel 7 - Status Pelayanan Informasi	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Pendokumentasian Kegiatan Internal Pusbangkom Manajemen	9
Gambar 2 - Pengarsipan Dokumentasi Kegiatan	10
Gambar 3 – Publikasi Pusbangkom Manajemen Melalui Media Sosial BPSDM	10
Gambar 4 - Publikasi Pusbangkom Manajemen Melalui Website BPSDM	11
Gambar 5 - Publikasi Informasi melalui X-Banner	11
Gambar 6 - Publikasi di TV Corner	11
Gambar 7 - Publikasi Informasi di Info Dinding	12
Gambar 8 - Laporan Bulanan Pusbangkom Manajemen	16
Gambar 9 - Laporan PPID per-Triwulan Pusbangkom Manajemen	17
Gambar 10 - Laporan Kinerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020	17
Gambar 11 - Profil Kerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020	18
Gambar 12 - Profil Kerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020	18
Gambar 13 - Dasar Hukum PPID Pusbangkom Manajemen	18
Gambar 14 - Biaya, Media, dan Waktu Pelayanan	19
Gambar 15 - Produk Hukum Pusbangkom Manajemen	19
Gambar 16 - Profil Pelatihan dan Struktur Pusbangkom Manajemen	19
Gambar 17 - SK PPID Pusbangkom Manajemen	20
Gambar 18 - SOP PPID	20
Gambar 19 - Struktur PPID Pusbangkom Manajemen	20
Gambar 20 - Tugas dan Fungsi PPID Pusbangkom Manajemen	20
Gambar 21 - Profil Singkat PPID Pusbangkom Manajemen	21
Gambar 22 - Kompetensi Petugas PPID Pusbangkom Manajemen	21
Gambar 23 - Maklumat Layanan PPID Pusbangkom Manajemen	21
Gambar 24 - Mekanisme Pelayanan PPID Pusbangkom Manajemen	21
Gambar 25 - Jadwal Petugas Layanan Informasi	22
Gambar 26 - Hasil Survey Kepuasan Layanan Informasi	22
Gambar 27 - Jadwal Kepala Pusat Pusbangkom Manajemen	22
Gambar 28 - Capaian Pelatihan Pusbangkom Manajemen Tahun 2020	23
Gambar 29 - Katalog Kompetensi, Standar Kompetensi, dan Profil Pelatihan Bidang Manajemen Tahun 2019	23
Gambar 30 - Struktur Organisasi PPID Pusbangkom Manajemen sesuai SK 24/KPTS/MF/2022	26
Gambar 31 - Ruang Layanan Informasi Publik	27
Gambar 32 - Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik	27
Gambar 33 - Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Sosial	28
Gambar 34 - TV Corner	28
Gambar 35 - Info Dinding	29
Gambar 36 - X-Banner	29
Gambar 37 - Alat Dokumentasi	29
Gambar 38 - Video Animasi Mengenai Jurnal Infrastruktur	30
Gambar 39 - Video Dokumentasi Kegiatan & Pelatihan	30
Gambar 40 - Tangkapan Layar Publikasi Informasi Melalui Instagram BPSDM	32

Gambar 41 - Tangkapan Layar Publikasi Informasi Melalui Twitter BPSDM.....	34
Gambar 42 - Tangkapan Layar Publikasi Informasi Melalui Facebook BPSDM	34
Gambar 43 - Tab Informasi Publik di website BPSDM	35
Gambar 44 - Tangkapan Layar Berita di website BPSDM Januari-Maret.....	40
Gambar 45 - Pigam dan Sertifikat Penghargaan PPID Pusbangkom Manajemen.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki era keterbukaan informasi, masyarakat sangat mudah memperoleh informasi dari berbagai media, dan informasi pun tersebar dalam waktu yang singkat. Berbagai institusi/organisasi pun berlomba-lomba melakukan penyebarluasan informasi tak terkecuali instansi pemerintah. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pun menyampaikan perlunya publikasi kinerja pemerintah kepada masyarakat karena saat ini masyarakat perlu mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah.

Publikasi kinerja pemerintah pun ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, turut mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Sehingga tujuan pemerintah untuk penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dapat terwujud.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan struktur organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, pelaksana PPID Pusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR adalah Bagian Data dan Informasi.

Untuk menjalankan fungsi PPID tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 63/KPTS/KM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 34/KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyampaikan bahwa Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, merupakan PPID BPSDM Daerah Tipe I.

Adapun tugas dari Pengarah PPID BPSDM Daerah Tipe I adalah:

- a. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan peraturan pengelola informasi dan dokumentasi di PPID BPSDM Daerah Tipe I;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dan/atau Pelaksana PPID BPSDM Daerah Tipe I dalam proses penyelesaian sengketa informasi;
- c. Memberikan arahan kepala pelaksanaan tugas Pelaksana PPID BPSDM Daerah Tipe I; dan
- d. Melaksanakan koordinasi dan memberikan tembusan pelaporan kepala Pengarah PPID BPSDM.

Sedangkan jenis pelayanan informasi Pengarah PPID BPSDM Daerah Tipe I yang diberikan kepada publik adalah:

- a. Informasi Pelatihan: meliputi jadwal pelaksanaan pelatihan (berkala), tempat pelaksanaan diklat, persyaratan peserta, dan tata cara registrasi untuk mengikuti diklat, serta rekap penyelenggaraan pelatihan (setiap saat).
- b. Informasi Beasiswa Pendidikan Kedinasan: meliputi jadwal pelaksanaan rekrutmen, pengajuan surat rekomendasi beasiswa yang masuk menjadi salah satu persyaratan utama dalam mengajukan beasiswa, dan tata cara pendaftaran, dan pengumuman hasil seleksi beasiswa (berkala);
- c. Informasi Kinerja: Meliputi Laporan Monitoring dan Evaluasi (berkala).

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen (Pusbangkom Manajemen) Triwulan I Periode Januari-Maret Tahun Anggaran 2023 ini dimaksudkan untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman stakeholders terkait mengenai tugas, fungsi, program, dan kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajemen di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta pelaporan kepada PPID Pusat BPSDM.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Menyebarkan informasi mengenai tugas, fungsi, program dan kegiatan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen kepada Pegawai Kementerian PUPR dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), masyarakat umum, kalangan akademisi, dan pers;
- b. Meningkatkan pengetahuan stakeholders terkait mengenai Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;
- c. Melengkapi kebutuhan data PPID Pusat BPSDM; dan
- d. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan arahan dan kebijakan selanjutnya.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP yang di jelaskan pula dalam Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2018 tentang SAKIP yang menjadi acuan Pusbangkom Manajemen untuk mempublikasi informasi terutama capaian kinerja dari Pusbangkom Manajemen.

Untuk menjalankan fungsi pelayanan informasi yang dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 24/KPTS/KM/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84/KPTS/KM/2021 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen membentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 24/KPTS/MF/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 84/KPTS/MF/2021 Tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

Adapun beberapa tugas dari PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen (Pusbangkom Manajemen) adalah:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang ada di masing - masing unit organisasi (unor);
- b. Menyediakan Dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID;
- c. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi pada unor terkait;
- d. Membantu PPID Pusat dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
- e. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Pusat.

Sedangkan jenis pelayanan informasi PPID Pusbangkom Manajemen yang diberikan kepada publik adalah:

a. Informasi Pelatihan

Meliputi jadwal pelaksanaan pelatihan (berkala), tempat pelaksanaan diklat, persyaratan peserta, dan tata cara registrasi untuk mengikuti diklat, serta rekap penyelenggaraan pelatihan (setiap saat).

b. Informasi Beasiswa Pendidikan Kedinasan

Meliputi jadwal pelaksanaan rekrutmen, pengajuan surat rekomendasi beasiswa yang masuk menjadi salah satu persyaratan utama dalam mengajukan beasiswa, dan tata cara pendaftaran, dan pengumuman hasil seleksi beasiswa (berkala);

c. Informasi Kinerja

Meliputi Laporan Monitoring dan Evaluasi (berkala).

2.2. Kegiatan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP

Implementasi Pelaksanaan kegiatan terkait KIP yang dilaksanakan di Pusbangkom Manajemen antara lain :

2.2.1. Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik Pusbangkom Manajemen

Pusbangkom Manajemen secara khusus telah membangun Ruang Layanan Informasi Publik Pusbangkom Manajemen yang terletak di Gedung Pusbangkom Manajemen Lantai 1 sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk keterangan detail akan diuraikan pada subbab 2.5.2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.

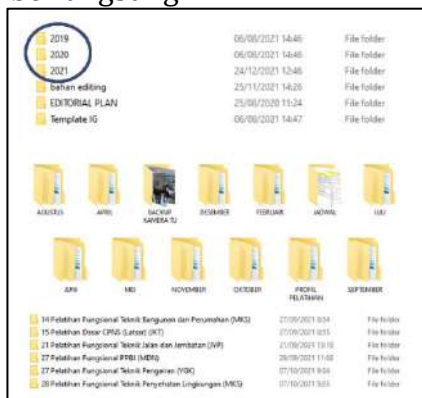
2.2.2. Peliputan dan pendokumentasian kegiatan Pusbangkom Manajemen

Pusbangkom Manajemen secara rutin mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, maka dari itu, peliputan dan pendokumentasian sangat di perlukan guna pelaporan kepada pimpinan dan publikasi. Peliputan dan pendokumentasian meliputi pengambilan foto dan pengumpulan data kegiatan.



Gambar 1- Pendokumentasian Kegiatan Internal Pusbangkom Manajemen

Hasil pendokumentasian diarsipkan secara digital dalam bentuk folder dan diklasifikasikan sesuai tahun, bulan, dan tanggal kegiatan berlangsung.

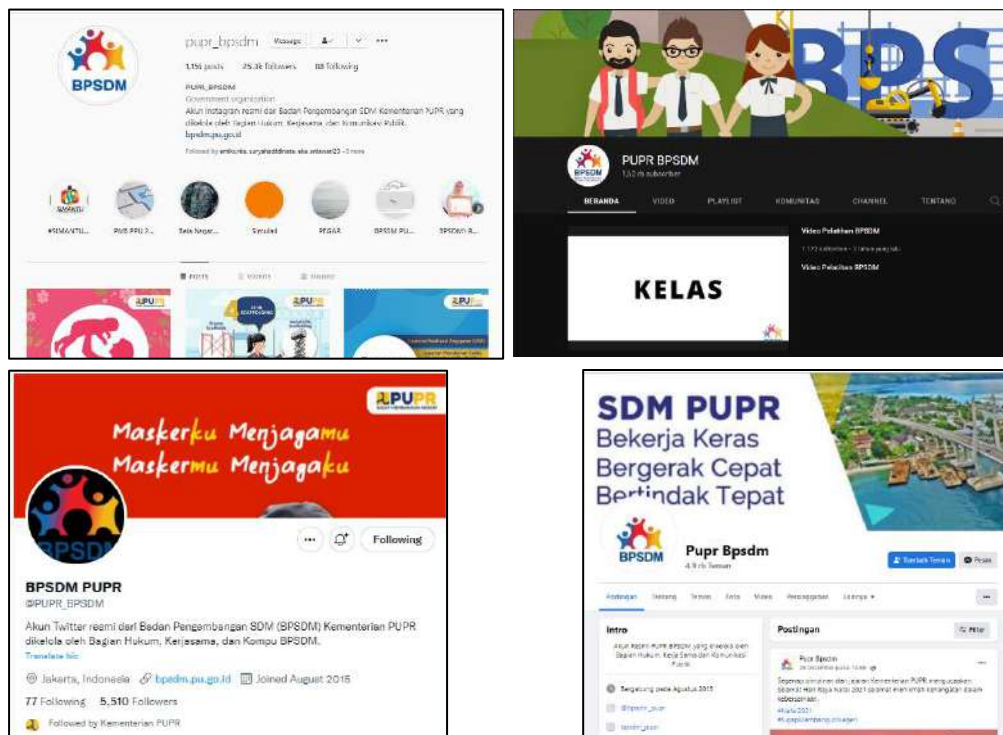


Gambar 2 - Pengarsipan Dokumentasi Kegiatan

2.2.3. Publikasi Produk Pusbangkom Manajemen

Hasil peliputan dan produk-produk Pusbangkom Manajemen biasanya dipublikasikan melalui kanal-kanal media sosial Pusbangkom Manajemen atau media informasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia baik media cetak maupun digital. Namun dengan terbitnya Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor 08/SE/SJ/2021 tentang Pengelolaan Platform Digital di Kementerian PUPR, mengharuskan Pusbangkom Manajemen menutup seluruh media sosial. Sehingga publikasi kegiatan langsung dikirimkan ke PPID Utama di BSPDM. Kanal-kanal yang digunakan, antara lain:

a. Media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube)



Gambar 3 – Publikasi Pusbangkom Manajemen Melalui Media Sosial BSPDM

b. Website



Gambar 4 - Publikasi Pusbangkom Manajemen Melalui Website BPSDM

c. X-Banner



Gambar 5 - Publikasi Informasi melalui X-Banner

d. TV Corner



Gambar 6 - Publikasi di TV Corner

e. InDing (Info Dinding)



Gambar 7 - Publikasi Informasi di Info Dinding

2.3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

2.3.1. Jumlah Pemohon Informasi

Sebelumnya, ada beberapa media yang digunakan Pusbangkom Manajemen untuk layanan permohonan informasi, diantaranya melalui Instagram (Kolom komentar dan Direct Message), Aplikasi Instant Messaging (WhatsApp), dan secara langsung di Ruang Layanan Informasi. Namun karena ditutupnya media sosial Pusbangkom Manajemen, saat ini sarana untuk melayani permohonan informasi hanya melalui e-PPID PUPR & BPSDM serta R. Layanan Informasi. Kuantitasnya pun sangat jauh menurun bahkan sama sekali tidak ada. Berikut rinciannya:

a. Pemohon Informasi Secara Langsung

Ruang Layanan Informasi Pusbangkom Manajemen dibuka sejak September 2019 dan telah melayani secara langsung pemohon informasi pada hari dan jam kerja. Jam operasional Ruang Layanan Informasi kami, dari pukul 09.00-11.00 dan 13.00-15.00 WIB. Tetapi, di luar jam tersebut kami tetap melayani permohonan informasi hingga batas waktu jam kerja selesai.

Dikarenakan pandemik COVID-19 maka mobilitas masyarakat pun dibatasi sehingga jumlah pemohon melalui R. Layanan Informasi sangat sedikit.

2.3.2. Persentase Data Pekerjaan Pemohon

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon informasi dibagi 3 (tiga) yaitu orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum/badan publik. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi yang dibagi berdasarkan media yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan informasi terkait Pusbangkom Manajemen:

a. E-PPID PUPR

Tabel 1 - Data Pekerjaan Pemohon Informasi Melalui e-PPID

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	0	0%
2.	Kelompok Orang	0	0%
3.	Badan Hukum	0	0%
Jumlah		0	0%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui e-PPID PUPR tidak ada sama sekali.

b. E-PPID BPSDM

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	0	0%
2.	Kelompok Orang	0	0%
3.	Badan Hukum	0	0%
Jumlah		0	0%

Tabel 2 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui e-PPID BPSDM

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui e-PPID BPSDM tidak ada sama sekali.

c. Ruang Layanan Informasi

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	0	0%
2.	Kelompok Orang	0	0%
3.	Badan Hukum	0	0%
Jumlah		0	0%

Tabel 3 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui R. Layanan Informasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa selama periode laporan ini dibuat tidak ada permohonan informasi dari media manapun.

2.3.3. Jumlah Permintaan Informasi

Permintaan informasi di Pusbangkom Manajemen dibagi menjadi beberapa topik informasi, yaitu terkait Pendidikan, Pelatihan, Penugasan Widyaiswara, dan informasi Lain-lain.

a. E-PPID PUPR

No.	Topik	Jumlah	Persentase
1.	Pendidikan	0	0%
2.	Pelatihan	0	0%
3.	Penugasan Widyaiswara	0	0%
4.	Jabatan Fungsional	0	0%
5.	Lain-lain	0	0%
Jumlah		0	0%

Tabel 4 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui e-PPID PUPR

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, diketahui bahwa tidak ada sama sekali melalui e-PPID PUPR.

b. E-PPID BPSDM

No.	Topik	Jumlah	Persentase
1.	Pendidikan	0	0%
2.	Pelatihan	0	0%
3.	Penugasan Widyaiswara	0	0%
4.	Jabatan Fungsional	0	0%
5.	Lain-lain	0	0%
Jumlah		0	0%

Tabel 5 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui e-PPID BPSDM

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, diketahui bahwa tidak ada sama sekali melalui e-PPID BPSDM.

c. Ruang Layanan Informasi

No.	Topik	Jumlah	Persentase
1.	Pendidikan	0	0%
2.	Pelatihan	0	0%
3.	Penugasan Widyaiswara	0	0%
4.	Jabatan Fungsional	0	0%
5.	Lain-lain	0	0%
Jumlah		0	0%

Tabel 6 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui R. Layanan Informasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, diketahui bahwa selama periode laporan ini dibuat tidak ada permohonan informasi dari media manapun.

2.3.4. Status Pelayanan Informasi

Media	Status	Jumlah	Persentase
e-PPID PUPR	Dipenuhi	0	0%
e-PPID BPSDM		0	0%
R. Layanan Informasi		0	100%

Tabel 7 - Status Pelayanan Informasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi, tidak ada permohonan informasi yang masuk.

2.3.5. Rata-rata Waktu Pelayanan

Permohonan informasi publik Pusbangkom Manajemen baik melalui Ruang Layanan Publik, e-PPID PUPR, dan e-PPID BPSDM adalah 5 (lima) hari kerja (Senin s.d. Jumat). Waktu untuk layanan informasi mengikuti jam kerja, yaitu mulai pukul 08.00 s.d. pukul 16.30 WIB.

Proses/tindak lanjut dari permohonan informasi adalah 10 hari kerja terhitung sejak pemohon mengajukan permohonan informasi ditambah 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan tergantung sifat dari informasi yang ditanyakan.

2.3.6. Informasi/Data yang Diminta Pemohon

Permohonan informasi di Pusbangkom Manajemen biasa nya di dominasi topik lain-lain yang lebih tepat nya mengenai Pelatihan dan Jabatan Fungsional.

2.3.7. Media Permintaan Informasi

Seperti yang sudah di jabarkan sebelumnya, Pusbangkom Manajemen sebelumnya menyediakan beberapa media yang bisa digunakan pemohon, yaitu media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube), Ruang Layanan Informasi, dan Pesan Singkat. Namun, terbitnya SE yang telah dijelaskan sebelumnya mengharuskan Pusbangkom Manajemen menutup semua sosial media sehingga sarana yang tersedia yaitu, Ruang Layanan Informasi, e-PPID PUPR, dan e-PPID BPSDM.

2.3.8. Jumlah Sengketa Informasi

Sampai dengan kurun waktu tahun 2021 tidak ada sengketa informasi terhadap pelayanan informasi publik Pusbangkom Manajemen.

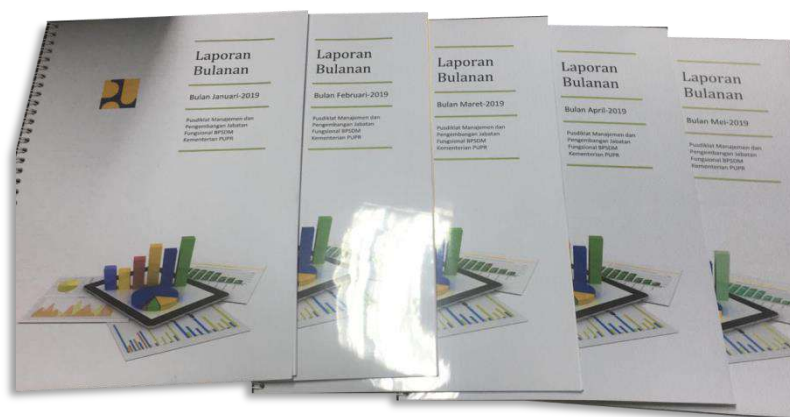
2.4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

a. Informasi Berkala dan Setiap Saat

Pusbangkom Manajemen menyediakan informasi berkala mengenai Laporan Bulanan terkini, Laporan Kinerja organisasi, Laporan PPID per-Triwulan, Profil Kerja, serta Struktur Organisasi, dan Daftar Pejabat, dll. Informasi-informasi tersebut dipublikasikan melalui Website BPSDM dan PUPR.

1. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan Pusbangkom Manajemen diterbitkan paling lambat tanggal 5 di bulan berikutnya disediakan dan dipubliaksi dalam bentuk digital. Selain dimuat dalam halaman *website* e-SAKIP yang dikelola oleh Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (PAKLN), juga dapat di akses di *website* BPSDM halaman PPID BPSDM Daerah.



Gambar 8 - Laporan Bulanan Pusbangkom Manajemen

2. Laporan PPID per-Triwulan

Laporan PPID Pusbangkom Manajemen di disediakan per-Triwulan dan disediakan dalam bentuk digital melalui *website* BPSDM.pu.go.id dan cetak yang tersedia di Ruang Layanan Informasi.



Gambar 9 - Laporan PPID per-Triwulan Pusbangkom Manajemen

3. Laporan Kinerja

Pusbangkom Manajemen menyediakan Laporan Kinerja dalam bentuk digital yang bisa di akses di *website* BPSDM.



Gambar 10 - Laporan Kinerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020

4. Profil Kerja Pusbangkom Manajemen

Pusbangkom Manajemen menyediakan Profil Kerja dalam bentuk digital yang bisa di akses di *website* BPSDM.



Gambar 11 - Profil Kerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020

5. Struktur Organisasi dan Daftar Pejabat

Pusbangkom Manajemen menyediakan Struktur Organisasi dan Daftar Pejabat dalam bentuk digital yang bisa di akses di *website* BPSDM.



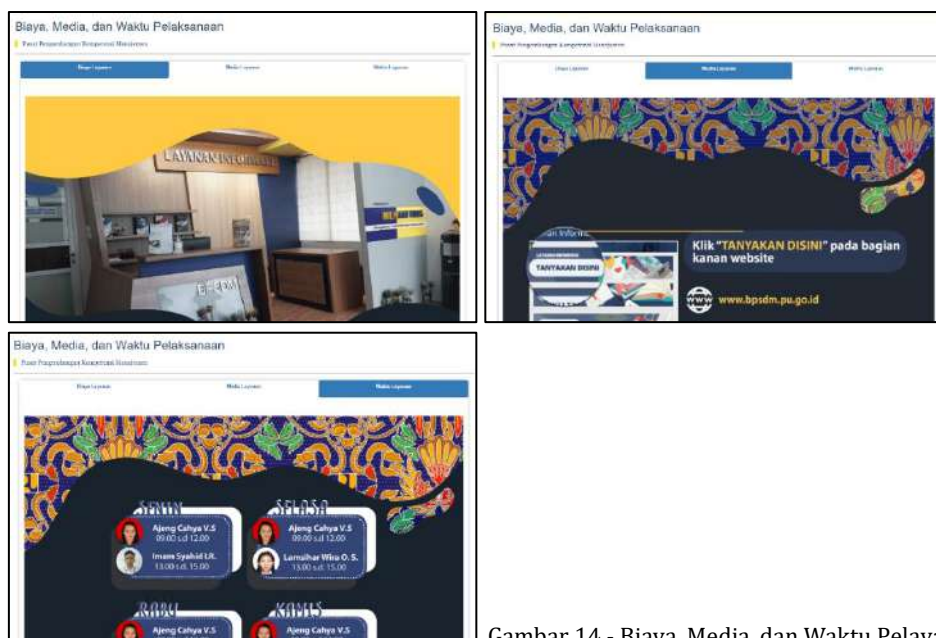
Gambar 12 - Profil Kerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020

6. Dasar Hukum PPID Pusbangkom Manajemen



Gambar 13 - Dasar Hukum PPID Pusbangkom Manajemen

7. Biaya, Media, dan Waktu Pelayanan



Gambar 14 - Biaya, Media, dan Waktu Pelayanan

8. Produk Hukum Pusbangkom Manajemen

Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

Show 10 entries

No	Deskripsi	File	Link	Tahun
1	Agenda Peningkatan Pengembangan Manajemen	Agenda PPM 2021.docx	Agenda Peningkatan Pengembangan Manajemen	2021
2	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen.pdf	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	2021
3	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen.pdf	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	2021
4	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen.pdf	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	2021
5	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen.pdf	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	2021
6	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen.pdf	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	2021
7	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen.pdf	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	2021
8	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen.pdf	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	2021
9	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen.pdf	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	2021
10	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen.pdf	Profil Organisasi Pusbangkom Manajemen	2021

Showing 1 to 10 of 25 entries

Gambar 15 - Produk Hukum Pusbangkom Manajemen

9. Profil Pelatihan dan Struktur Pusbangkom Manajemen

Informasi Wajib Disediakan Berkala

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

Show 10 entries

Search:

No	Deskripsi	File	Link	Tahun
11	Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	STRUKTUR PUSAT 4.png	Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	2021
23	Profil Pelatihan Bidang Manajemen Kepemimpinan, Konstruksi & Umum	Profil Pelatihan Bidang Manajemen 2020.pdf	Profil Pelatihan Bidang Manajemen Kepemimpinan, Konstruksi & Umum	2020

Showing 1 to 2 of 2 entries (filtered from 32 total entries)

Previous Next

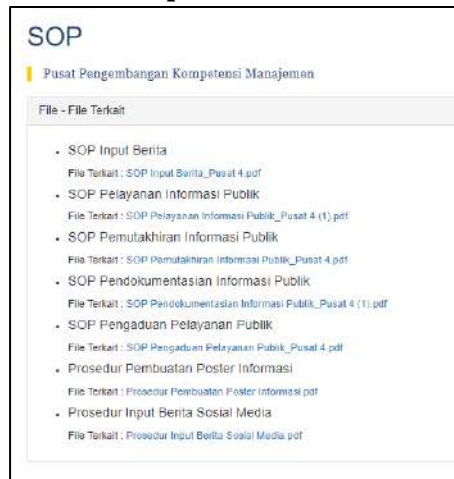
Gambar 16 - Profil Pelatihan dan Struktur Pusbangkom Manajemen

10. Surat Keputusan PPID Pusbangkom Manajemen



Gambar 17 - SK PPID Pusbangkom Manajemen

11. Standard Operation Procedure (SOP) PPID Pusbangkom Manajemen



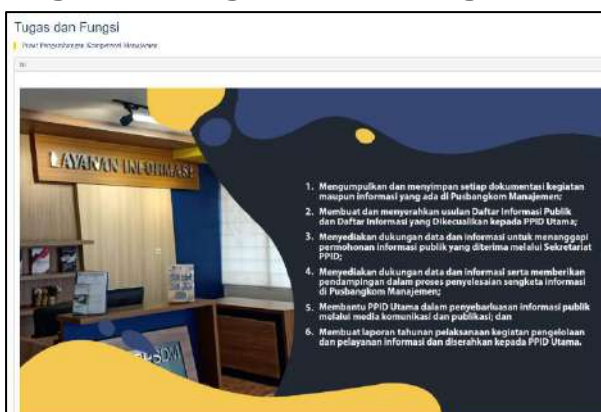
Gambar 18 - SOP PPID

12. Struktur PPID Pusbangkom Manajemen



Gambar 19 - Struktur PPID Pusbangkom Manajemen

13. Tugas dan Fungsi PPID Pusbangkom Manajemen



Gambar 20 - Tugas dan Fungsi PPID Pusbangkom Manajemen

14. Profil Singkat PPID Pusbagkom Manajemen



Gambar 21 - Profil Singkat PPID Pusbagkom Manajemen

15. Kompetensi Petugas PPID Pusbangkom Manajemen



Gambar 22 - Kompetensi Petugas PPID Pusbangkom Manajemen

16. Maklumat Layanan PPID Pusbangkom Manajemen



Gambar 23 - Maklumat Layanan PPID Pusbangkom Manajemen

17. Mekanisme Pelayanan PPID Pusbangkom Manajemen



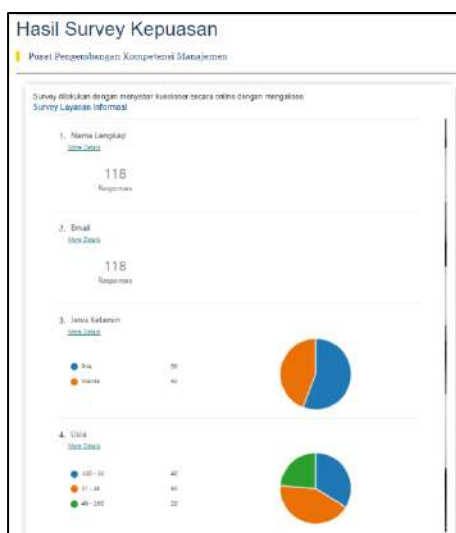
Gambar 24 - Mekanisme Pelayanan PPID Pusbangkom Manajemen

18. Jadwal Petugas Layanan Informasi



Gambar 25 - Jadwal Petugas Layanan Informasi

19. Hasil Survey Kepuasan Layanan Informasi



Gambar 26 - Hasil Survey Kepuasan Layanan Informasi

20. Jadwal Kepala Pusat per-Tahun

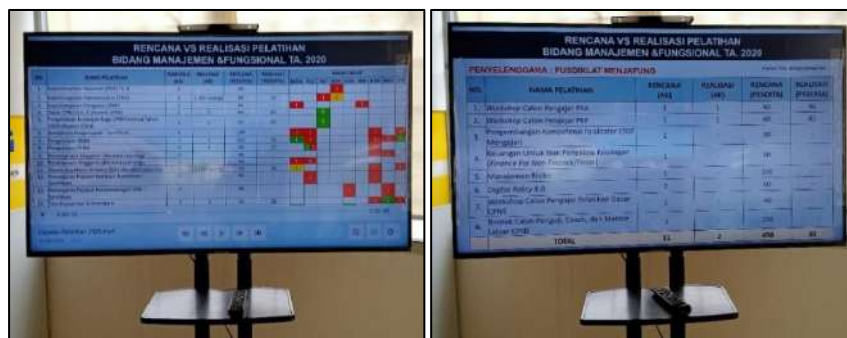
Pada *website* BPSDMP terdapat Jadwal Kepala Pusat per-Tahun secara digital.

Tahun	Jabatan	Nama Kepala Pusat
2019	Kelembagaan	Dr. H. H. H. H. H.
2020	Kelembagaan	Dr. H. H. H. H. H.
2021	Kelembagaan	Dr. H. H. H. H. H.

Gambar 27 - Jadwal Kepala Pusat Pusbangkom Manajemen

21. Capaian Pelatihan Tahun 2020

Pusbangkom Manajemen menyediakan data mengenai Capaian Pelatihan Tahun 2020 secara digital di TV Corner dalam Ruang Layanan Informasi.



Gambar 28 - Capaian Pelatihan Pusbangkom Manajemen Tahun 2020

b. Informasi Serta Merta

Saat ini, Pusbangkom Manajemen menyediakan informasi serta merta terkait penanggulangan bencana pandemik COVID-19.



Gambar 29 - Katalog Kompetensi, Standar Kompetensi, dan Profil Pelatihan Bidang Manajemen Tahun 2019

2.5. Kondisi Layanan Informasi Publik

Kondisi layanan informasi publik di Pusbangkom Manajemen meliputi informasi jumlah SDM dan sarana prasarana yang tersedia dan digunakan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi.

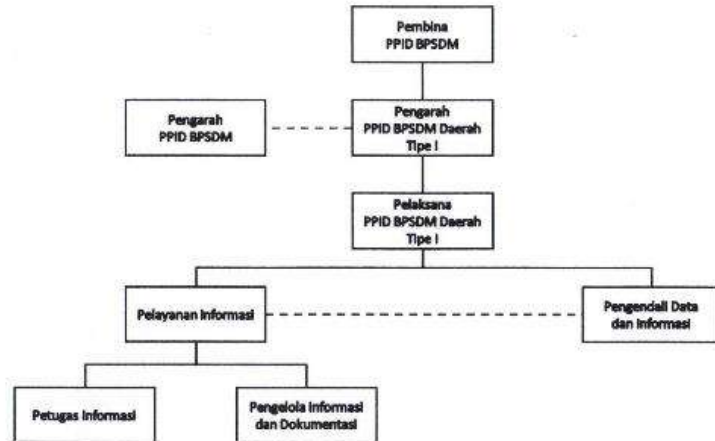
Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 34/KPTS/KM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84//KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di mana Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang saat disusunnya laporan ini telah berubah nomenklatur menjadi Pusbangkom Manajemen sebagai PPID Daerah Tipe I yang menyelenggarakan layanan informasi publik secara mandiri, maka dibuatlah organisasi PPID untuk mewujudkan layanan informasi yang memadai.

Pembentukan organisasi PPID dimulai dengan menerbitkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 105/KPTS/MF/2019 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian PUPR. Setelah pergantian nomenklatur struktur organisasi internal Pusbangkom Manajemen juga mengalami perubahan. Untuk itu, diterbitkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 84/KPTS/KM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 56//KPTS/KM/2021 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penerapan Mekanisme Kerja Baru Pasca Penyederhanaan Birokrasi di Kementerian PUPR yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 20/SE/M/2023 menyebabkan perubahan nama bagian-bagian dalam Pusbangkom Manajemen. Sehingga diterbitkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 39/KPTS/KM/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84/KPTS/KM/2021 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

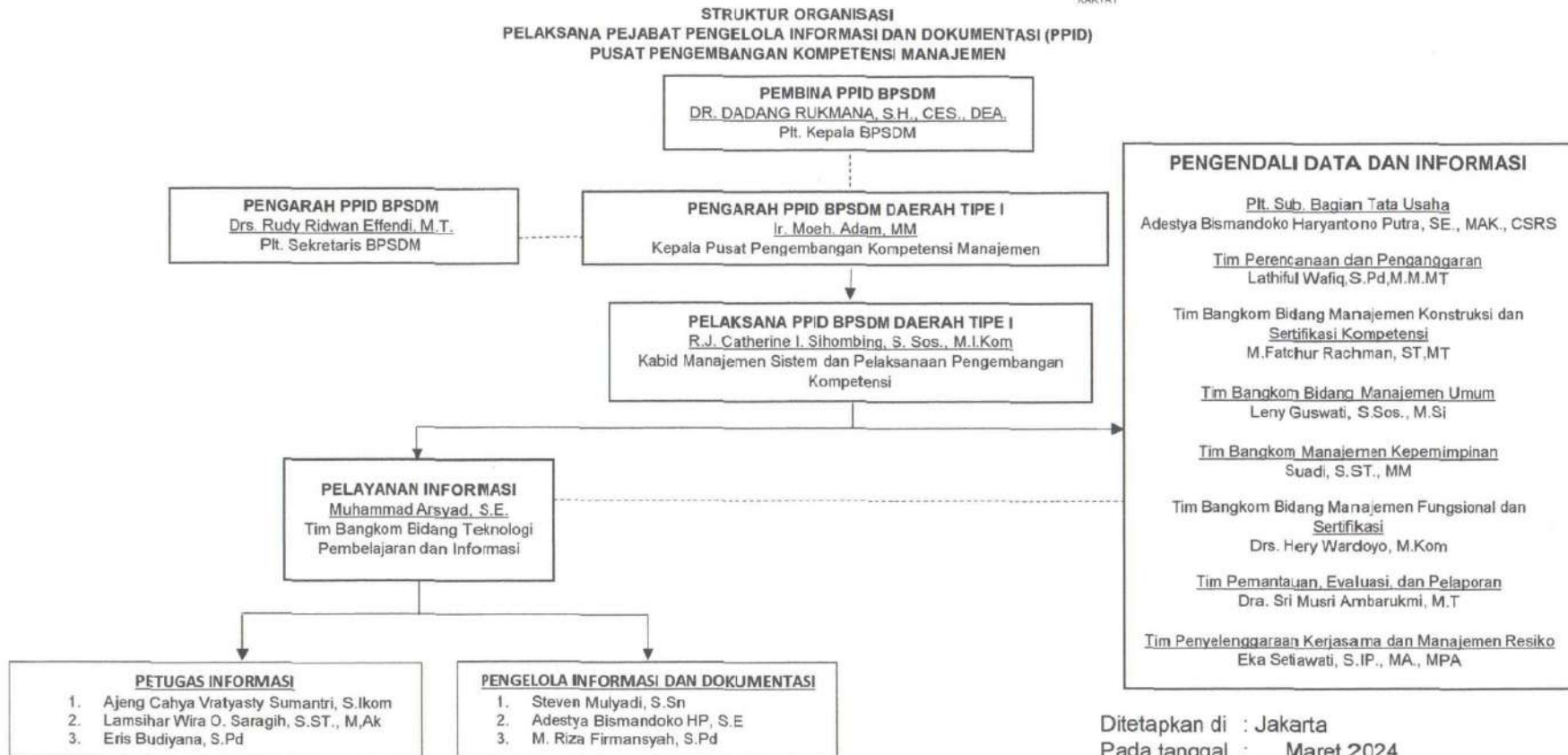
2.5.1. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Menurut Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 34/KPTS/KM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84//KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, struktur organisasi PPID Pusbangkom Manajemen sebagai PPID Daerah Tipe I adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH TIPE I**



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: KPTS/MP/2024
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PUSAT
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT



Gambar 30 - Struktur Organisasi PPID Pusbangkom Manajemen sesuai SK 39/KPTS/MF/2024

Kepala Pusat Pengembangan
Kompetensi Manajemen,



Ir. Moeh. Adam, MM
NIP. 196503031993031002

Pelaksana PPID Pusbangkom Manajemen dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Pelaksana Informasi dan 7 (tujuh) orang Pejabat Pengendali Data dan Informasi. Terdapat 1 (satu) orang Pelayan Informasi dan 3 (tiga) Petugas Informasi serta 3 (tiga) orang Pengelola Informasi dan Dokumentasi.s

2.5.2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk dapat memberikan pelayanan informasi publik yang memadai, Pusbangkom Manajemen menyediakan beberapa saran dan prasarana yang digunakan, diantaranya:

a. Ruang Layanan Informasi

Ruang Layanan Informasi Pusbangkom Manajemen terdapat di Gedung Pusbangkom Manajemen Lt. 1 dengan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan pemohon informasi. Letak nya yang strategis di dekat pintu masuk Gedung Pusbangkom Manajemen juga muda untuk diakses pemohon informasi.



Gambar 31 - Ruang Layanan Informasi Publik

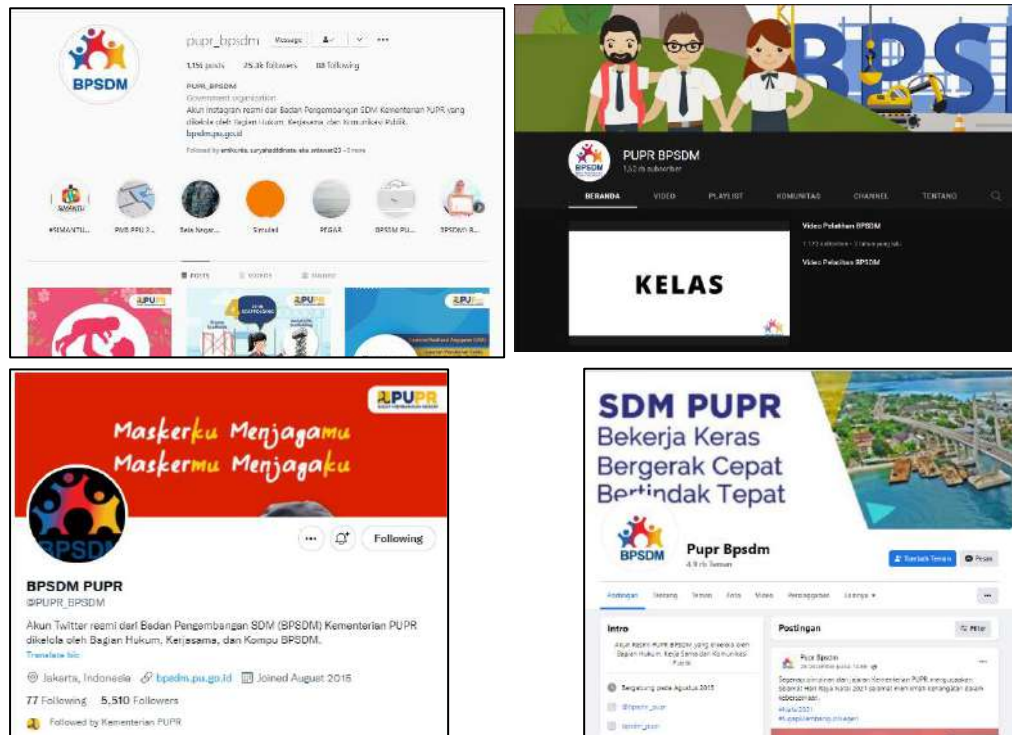


Gambar 32 - Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik

b. Media Sosial

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa semua media sosial Pusbangkom Manajemen telah ditutup. Sehingga semua kegiatan publikasi melalui media sosial dialihkan ke media sosial BPSDM sebagai PPID Utama.

Informasi mengenai kebijakan, pelatihan, pendidikan, dan pencapaian kinerja Pusbangkom Manajemen di publikasikan melalui media sosial tersebut. Berikut tampilan media sosial BPSDM:



Gambar 33 - Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Sosial

c. TV Corner

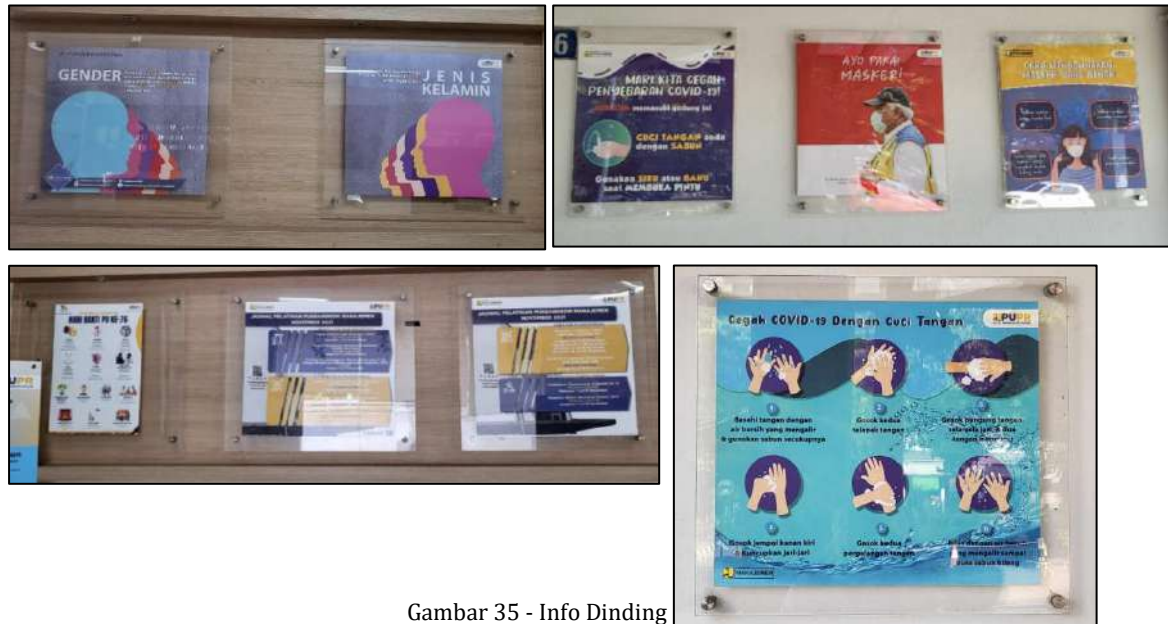
Untuk memberikan informasi secara menghibur dan inovatif, Pusbangkom Manajemen menyediakan media berupa TV di Ruang Layanan Informasi dan ruang tunggu di lobby yang menayangkan materi profil, capaian kinerja, jadwal pelatihan, bahan tayang mengenai jurnal infrastruktur, pengetahuan mengenai DUPAK, dll.



Gambar 34 - TV Corner

d. InDing (Info Dinding)

Berlokasi di dekat ruang tunggu lantai 1 Gedung Pusbangkom Manajemen, Info Dinding merupakan salah satu media yang disediakan untuk informasi Pusbangkom Manajemen dalam bentuk poster.



Gambar 35 - Info Dinding

e. X-Banner

Untuk menambah media publikasi informasi, Pusbangkom Manajemen juga menyediakan beberapa X-Banner yang berlokasi di Ruang Layanan Informasi, di samping meja resepsionis, dan disamping lift.



Gambar 36 - X-Banner

c. Alat Dokumentasi



Gambar 37 - Alat Dokumentasi

2.6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

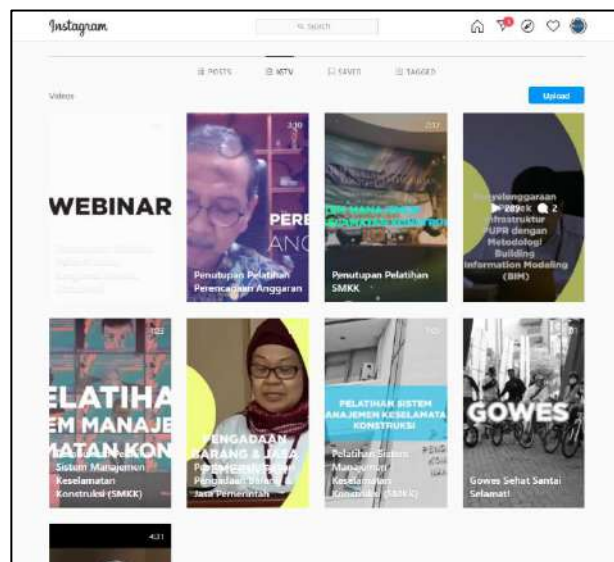
Pusbangkom Manajemen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik juga melakukan upaya pengembangan inovasi. Hal ini diharapkan selain dapat mempermudah penyampaian informasi juga untuk menarik minat publik untuk mengakses informasi tersebut. Salah satu inovasi dalam bidang pelayanan publik yang dilakukan guna menambah variasi penyampaian informasi adalah melalui video animasi.

1. Mengemas Informasi dalam Bentuk Audio-Visual

Pusbangkom Manajemen berusaha mengemas informasi ke dalam video animasi ataupun dokumentasi dalam bentuk video yang menarik dan dilengkapi dengan Voice Over ataupun Caption sehingga mudah di mengerti.



Gambar 38 - Video Animasi Mengenai Jurnal Infrastruktur



Gambar 39 - Video Dokumentasi Kegiatan & Pelatihan

2. Memanfaatkan media daring lebih optimal

Dalam masa pandemi, pelayanan dan penyebaran informasi secara daring menjadi salah satu cara yang populer. Pusbangkom Manajemen berkoordinasi dengan BPSDM untuk mempublikasikan informasi di media daring BPSDM.

a. **Publikasi Konten Informasi Melalui Media Sosial BPSDM**

Pusbangkom Manajemen melakukan pengajuan konten pada link <https://bit.ly/3JheLcC> untuk mempublikasi informasi di media sosial BPSDM. Berikut rinciannya:

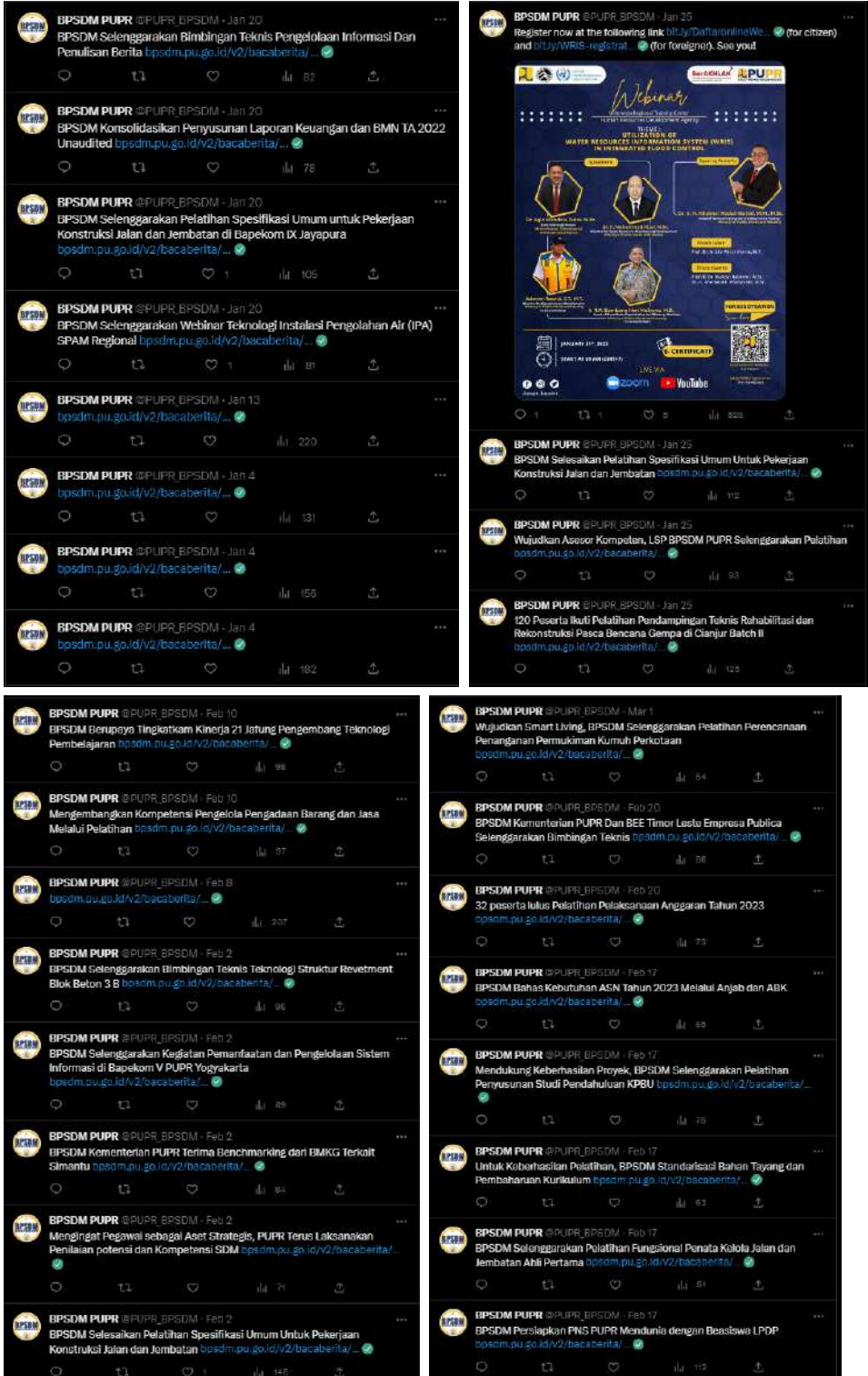
- **Instagram**





Gambar 40 - Tangkapan Layar Publikasi Informasi Melalui Instagram BPSDM

●





Gambar 41 - Tangkapan Layar Publikasi Informasi Melalui Twitter BPSDM

• Facebook



Gambar 42 - Tangkapan Layar Publikasi Informasi Melalui Facebook BPSDM

b. Melengkapi Dokumen Terkait Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Wajib Disediakan Berkala

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

No	Deskripsi	File	Tahun	Status
1	Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
2	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
3	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
4	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
5	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
6	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
7	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
8	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
9	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
10	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai

Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

No	Deskripsi	File	Tahun	Status
1	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
2	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
3	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
4	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
5	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
6	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
7	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
8	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
9	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai
10	Laporan Penyelenggaraan Tahunan: Monev, Rencana Strategis, dan Laporan Tahunan	LRAK 2020.pdf	2020	Selesai

Laporan Pelaksanaan

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

File - File Terkait

- Laporan Petugas Layanan Informasi Pusbangkom Manajemen Periode Semester I Januari-Juni 2020
File Terkait : LAPORAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PERIODE JANUARI (1).pdf
- Laporan PPID Pusbangkom Manajemen Semester I Periode Januari-Juni 2020
File Terkait : LAPORAN PPID SEMESTER I PUSAT 4 TAHUN 2020 - Tersedia Tanpa.pdf
- Laporan PPID Pusbangkom Manajemen Triwulan I Periode Januari-Maret
File Terkait : LAPORAN PPID PUSAT 4 TWA 1.pdf
- Laporan PPID Pusbangkom Manajemen Triwulan II Periode April-Juni
File Terkait : LAPORAN PPID PUSAT 4 TWA 2.pdf
- Laporan PPID Pusbangkom Manajemen Triwulan III Juli-September
File Terkait : PUSAT 4 LAP UNIT PPID TWA 2020 SIGNED.pdf
- Laporan PPID Pusbangkom Manajemen Triwulan IV Periode Oktober-Desember
File Terkait : LAPORAN PPID TWA 4 SIGNED_compressed_dikompres.pdf
- Laporan Petugas PPID Pusbangkom Manajemen Triwulan I Periode Januari-Maret
File Terkait : LAPORAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PERIODE JANUARI (1).pdf
- Laporan Petugas PPID Pusbangkom Manajemen Triwulan II Periode April-Juni
File Terkait : LAPORAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PERIODE JANUARI (1).pdf
- Laporan Petugas PPID Pusbangkom Manajemen Triwulan III Periode Juli-September
File Terkait : PUSAT 4 LAP PETUGAS PPID TWA 2020 SIGNED.pdf
- Laporan Petugas PPID Pusbangkom Manajemen Triwulan IV Periode Oktober-Desember
File Terkait : LAPORAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PERIODE JANUARI (1).pdf
- Laporan PPID Triwulan I Januari-Maret 2021
File Terkait : LAPORAN PPID PUSAT 4 TRIWULAN I 2021.pdf
- Laporan PPID Tahun 2020
File Terkait : LAPORAN PPID TA 2020.pdf
- Laporan Keterbukaan Informasi Publik di Pusbangkom Manajemen Triwulan II Periode April-Juni 2021
File Terkait : LAPORAN PPID PUSANGKOM MANAJEMEN TRIWULAN II APR-JUN 2021_compressed.pdf
- Laporan PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Triwulan III Periode Juli-September 2021
File Terkait : Laporan PPID Triwulan III Juli-September_compressed.pdf

Informasi Wajib Serta Merta

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

File - File Terkait

- Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
File Terkait : Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
- Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
File Terkait : Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
- Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
File Terkait : Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
- Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
File Terkait : Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
- Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
File Terkait : Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
- Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
File Terkait : Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
- Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
File Terkait : Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
- Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
File Terkait : Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
- Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
File Terkait : Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
- Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19
File Terkait : Penanggulangan di Inspeksi Kementerian PUPR terkait bencana non-alam pandemi COVID-19

Profil PPID

- Profil Singkat
- Dasar Hukum
- Tugas dan Fungsi
- Struktur Organisasi

Standar Layanan

- Visi, Misi, dan Motto Pelayanan
- Maklumat Layanan
- Biaya, Media, dan Waktu Pelaksanaan
- SK PPID BPSDM
- Mekanisme Layanan Informasi
- Petugas Layanan
- SOP
- Hasil Survey Kepuasan

Gambar 43 - Tab Informasi Publik di website BPSDM

c. Berkontribusi dengan Menulis Beberapa Draft Berita di website BPSDM

KEMENTERIAN PUPR HASILKAN 316 KARYASISWA MAGISTER SUPER SPESIALIS DAN 103 KARYASISWA LPDP DAN DONOR LAIN

08 Januari 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 1142

Percepatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sebagai modal utama dalam mencapai keberhasilan mewujudkan infrastruktur PUPR yang berkualitas dan handal. Salah satu caranya dengan mengembangkan insan PUPR melalui jalur pengembangan kompetensi pendidikan yang bermutu.

Untuk membangun SDM yang kompeten, berani, berjiwa seni dan berahliah, BPSDM melakukan terobosan terobosan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pendidikan. Salah satu terobosan tersebut adalah membangun kerja sama Program Magister Super Spesialis (MSS) secara tailor made untuk membangun SDM yang memiliki keahlian teknis spesifik sesuai kebutuhan dan memiliki daya saing. Selain itu juga, sesuai arahan Bapak Menteri PUPR, agar mengirimkan pegawai PUPR sekurang-kurangnya 100 orang pertahun melalui program LPDP. Tak ketinggalan, BPSDM juga mengelola Pendidikan Vokasi melalui Politeknik PU.

Dalam tiga tahun terakhir (2020-2023), Kementerian PUPR telah berhasil meluluskan 316 Karyasiswa program Magister Super Spesialis, dan 103 Karyasiswa melalui beasiswa LPDP dan Lembaga donor lain.

Melalui pendidikan tugas belajar, Kementerian PUPR komitmen membangun kompetensi generasi muda. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono berpesan kepada para Karyasiswa yang akan berangkat melanjutkan pendidikan, kesempatan belajar di luar negeri/dalam negeri adalah anugerah yang patut disyukuri hanya dengan belajar serius. Sekolah mengubah jalan hidup dan memberikan bekal yang besar untuk lebih berkembang. Kita harus memiliki "fighting spirit for better education".

Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dilaksanakan oleh BPSDM melalui 2 (dua) pola pendidikan, yaitu Pendidikan kerja sama dan Pendidikan non kerja sama.

Beasiswa LPDP tahun 2023, berhasil mencapai target tahunan yang ditetapkan oleh Bapak Menteri dimana 102 pegawai lulus beasiswa LPDP di dalam negeri maupun di luar negeri.

Beasiswa Magister Superspesialis diantaranya Program Magister Super Spesialis Teknik pada tahun 2023 diikuti sebanyak 142 karyasiswa dan Program Magister Super Spesialis Non Teknik pada tahun 2023 sebanyak 40 orang karyasiswa.

Sedangkan Beasiswa Donor Lainnya Sejak tahun 2016, telah diikuti oleh 173 pegawai dinyatakan telah mendapatkan beasiswa dari lembaga lain dengan komposisi Karyasiswa terbanyak berasal dari lembaga donor dalam negeri dengan jumlah 106 orang.

Kementerian PUPR juga membuka kesempatan bagi Pegawai yang memiliki latar belakang Pendidikan D-III untuk mengikuti Beasiswa Alih Program ke S-1 di Universitas Cenderawasih pada tahun 2023 yakni sebanyak 23 orang.

Dalam pendidikan vokasi, Politeknik PU tahun 2023 Politeknik PU telah merekrut peserta didik 724 orang dimana telah terpenuhi 96,91% dari target 732 orang.

BPSDM MEMBUKA SEKALIGUS 2 PELATIHAN MANAJEMEN KONSTRUKSI DAN PELATIHAN KPBU

31 Januari 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 1111

Medan, 29 Januari 2024 – Untuk menghasilkan pembangunan infrastruktur yang baik dan tepat guna bagi masyarakat, diperlukan manajemen konstruksi yang mumpuni. Selain itu, guna mempercepat penyediaannya diperlukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Berupaya menyediakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dalam bidang-bidang tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Pelatihan Manajemen Konstruksi di Surabaya dan Pelatihan KPBU di Medan, Senin (29/1).

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di tengah persaingan global yang semakin ketat. Hal tersebut bisa dipicu oleh penyediaan infrastruktur yang cepat. KPBU merupakan salah satu solusi efektifnya. Selain pemenuhan financial gap, KPBU juga dapat meningkatkan pemanfaatan nilai uang (value for money) melalui pembagian risiko, pengelolaan aset yang bersinergi, dan adanya inovasi pembiayaan dan teknologi.

Melalui pelatihan maka penyelesaian proyek konstruksi dapat berjalan secara efektif dengan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya yang optimal. Kualitas dan keselamatan yang tepat dengan tetap memenuhi prinsip keberlanjutan pun dapat dipastikan bila proses manajemen konstruksi berlangsung dengan baik. Mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian semua aspek yang terlibat dalam pembangunan sebuah proyek konstruksi harus diperhatikan.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Moeh. Adam dalam pidatonya saat membuka pelatihan mengingatkan tentang Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, "Penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang handal dan bermanfaat dengan memenuhi ketentuan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi."

"ASN Bidang PUPR dalam hal ini perlu terus mengembangkan kompetensinya khususnya terkait Manajemen Konstruksi dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara lebih profesional," lanjut Adam.

Pelatihan KPBU diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi (Bapecom) PUPR Wilayah I Medan hingga 2 Februari mendatang secara daring selama 33 Jam Pelajaran (JP) dan diikuti oleh 30 orang peserta. Sedangkan Pelatihan Manajemen Konstruksi diselenggarakan oleh Bapecom PUPR Wilayah VI Surabaya hingga 6 Februari mendatang secara tatap muka dan daring selama 48 JP dan diikuti oleh 31 orang peserta.

BPSDM SELENGGARAKAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PBJ LEVEL 1 DI BAPEKOM PUPR WILAYAH I MEDAN

06 Februari 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 1103

Medan, 5 Februari 2024 – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) harus bersifat inklusif dan tidak melulu bertujuan untuk value for money. Untuk menjalankan kewajiban tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Maka, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi PBJ level 1 di Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PUPR Wilayah I Medan yang akan dilaksanakan hingga 23 Februari mendatang secara daring dan tatap muka.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen diwakili Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksana Pengembangan Kompetensi RJ Catherine I. Sihombing saat membuka pelatihan secara resmi mengatakan Sertifikasi PBJ Level-1 ini merupakan salah satu persyaratan jabatan tersebut sebagai modal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang PBJ secara profesional.

Selain itu, RJ Catherine I. Sihombing, menyampaikan, "Berdasarkan hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dari Unit Organisasi di Kementerian PUPR pada TA 2023, dibutuhkan pelatihan dan sertifikasi PBJ Level-1 bagi sekitar 968 orang ASN (Aparatur Sipil Negara)."

Para pengajar yang berasal dari Widaiswara dan praktisi akan memaparkan materi selama 36 Jam Pelajaran (JP) secara e-Learning pada 5 s.d 16 Februari dan 46 JP saat tatap muka pada 19 s.d 23 Februari. Sebanyak 36 orang peserta yang berasal dari berbagai Unit Organisasi dan Unit Kerja mengikuti pelatihan ini demi peningkatan kompetensi pada bidang PBJP.

BPSDM MENGHADIRKAN PESERTA PELATIHAN MANAJEMEN KONSTRUKSI YANG BERAKSI, BERUBAH, DAN BERDAMPAK

07 Februari 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 1070

Surabaya, 6 Februari 2024 – Setelah menjalani Pelatihan Manajemen Konstruksi selama 7 hari sejak 29 Januari lalu di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya, 21 orang peserta dinyatakan lulus pada Selasa (6/2). Pelatihan ini menjadi salah satu upaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menghadirkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dalam bidang manajemen konstruksi.

Mula dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian semua aspek yang terlibat dalam pembangunan sebuah proyek konstruksi harus di atur dengan seksama oleh SDM yang kompeten. Sehingga tercapai penyelesaian proyek dengan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya yang optimal. Tentunya dengan memastikan kualitas dan keselamatan yang tepat.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib menyediakan hasil pekerjaan konstruksi yang handal dan bermanfaat dengan memenuhi ketentuan terbit penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pelaksana Tugas (PT) Kepala BPSDM, Dadang Rukmana menyampaikan pada sambutannya, "Inti pelatihan ini adalah agar kita beraksi, berubah, dan berdampak."

"Pelatihan ini berhasil kalau kualitas pelayanan infrastruktur kita meningkat. Kalau hanya sekedar ilmu tidak cukup tapi harus menjadi suatu perilaku, suatu attitude," lanjut Dadang.

Dadang juga mengingatkan peserta pada pesan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bahwa infrastruktur merupakan perekat bangsa. "When you build infrastructure, you build the nation".

Rampung secara resmi, tite diantara 21 orang peserta lulus berhasil meraih predikat peserta terbaik pada pelatihan ini. Terbaik pertama diraih Rhyno Eka Ajiyanto dari Direktorat Kepetuhan Interim terbaik kedua diraih Miftahul Jannah dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan terbaik ketiga diraih Fitma Veronice Pesisir dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga.

"Semoga ilmu yang didapatkan dari Pelatihan Dilat Manajemen Konstruksi, bisa bermanfaat untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi di Tapp - Tapp Balai Besar atau Balai (Sumber Daya Air) bisa dilaksanakan dan bisa mengurangi dampak negatnya dengan cara selalu berfati - hati dalam mengambil tindakan atau mengemukakan kebijakan dalam Pekerjaan Konstruksi," ungkap Rhyno Eka Ajiyanto.

MEMBANGUN PROYEK BERKUALITAS TINGGI, BPSDM SELENGGARAKAN PELATIHAN HUKUM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DAN PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

18 Februari 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 1032

Jakarta, 19 Februari 2024 – Sebuah pekerjaan konstruksi untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dijalankan dan dipenuhi dengan baik bila pembangunan berjalan dengan lancar. Salah satu faktor pendukungnya adalah terbit penyelenggaraan konstruksi. Dimana salah satu indikatornya adalah terlaksananya pelaksanaan jasa konstruksi sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten khususnya dalam bidang Hukum Kontrak Kerja Konstruksi (HKKK) dan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi. guna memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Pelatihan HKKK di Jakarta and Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi di Jayapura. Dibuka secara resmi pada Senin (19/2) secara daring, masing-masing pelatihan ini akan berlangsung hingga 28 dan 27 Februari mendatang.

Pada pidato pembukaannya, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Moeh. Adam menyampaikan, "Saya harap seluruh peserta dapat menjalani pelatihan ini secara serius. Agar semua materi bermanfaat dapat dijadikan bekal untuk diimplementasikan ketika kembali ke unit kerja masing-masing."

Sebanyak 31 orang peserta mengikuti Pelatihan HKKK yang diselenggarakan oleh Bapekom PUPR Wilayah III Jakarta secara daring dan 31 orang peserta mengikuti Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi yang diselenggarakan di Bapekom PUPR Wilayah IX Jayapura secara daring dan tatap muka.

Pada pelatihan HKKK, hingga 28 Februari mendatang para peserta akan dipejakan materi selama 30 Jam Pelajaran (JP) oleh para pengajar dan widaiswara yang ahli di bidangnya. Sedangkan pada pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi, para pengajar akan memaparkan materi selama 12 JP saat tatap muka dan 40 JP saat daring.

BPSDM MENYELENGGARAKAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL 1 DI BAPEKOM PUPR WILAYAH II PALEMBANG.

19 Februari 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 1056

Indonesia telah melakukan reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang diinisiasi oleh LKPR. Dari semula yang hanya merupakan tugas administratif dan ad-hoc berubah menjadi tugas yang strategis dengan melibatkan pengelola pengadaan barang/jasa yang profesional dan permanen (Perpres No.12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa).

Kementerian PUPR telah melakukan reformasi organisasi, bahwa unit pengadaan barang dan jasa adalah berdiri sendiri yang terlepas dari pelaksana atau pemilik dari barang dan jasa yang disediakan. Oleh karena itu BPSDM menyelenggarakan Pelatihan Dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 yang dibuka pada hari ini, 19 Februari 2024 di Bapekom PUPR Wilayah II Palembang.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Moeh. Adam berpesan, "Harapannya bertujuan agar proses pengadaan ini menjadi independen dan dijamin akuntabilitasnya, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Poljia, maupun Pejabat Pengadaan yang berkompeten dan berintegritas sangat penting sehingga perlu untuk dikembangkan kompetensinya dan calon-calonnya harus disertifikasi."

"Sertifikasi PJB Level-1 ini menjadi salah satu persyaratan jabatan tersebut sebagai model dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang PJB secara profesional," tegas Moeh Adam.

Kegiatan ini dihadiri 36 peserta yang berasal dari Unit Organisasi di Kementerian PUPR dan akan diberikan materi pembekalan sebanyak 80 Jam Pelatihan selama 15 hari mulai tanggal 19 Februari – 08 Maret 2024.

BPSDM LATIH PESERTA PELATIHAN DALAM PENERAPAN BIM DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.

24 Februari 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 1023

Benjarmasin, 22 Februari 2024 - Berdasarkan UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkannya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten agar dapat melaksanakan tugas fungsinya.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melaksanakan Pelatihan Penyelenggaraan Proyek Infrastruktur PUPR dengan Metodologi Building Information Modeling (BIM) di Wilayah VII Banjarmasin. Tujuannya agar peserta mampu menerapkan sistem teknologi Building Information Modeling (BIM) dalam pembangunan infrastruktur.

Pelatihan diikuti oleh 25 orang peserta ASN yang dilaksanakan secara Blended Learning pada tanggal 22 Februari - 01 Maret 2024, dengan meliputi 66 Jam Pelajaran.

Kegiatan dibuka secara daring oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen yang diwakili oleh Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, R.J. Catherine I. Sihombing, "Bapak dan Ibu yang telah mengikuti pelatihan ini dapat menjalankan tugas di unit kerja masing-masing dengan menerapkan pengetahuan dan kemampuan dalam pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan menggunakan sistem teknologi Building Information Modeling (BIM) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pemeliharaan," ucap Catherine.

TINGKATKAN PENGETAHUAN INVESTASI, BPSDM SELENGGARAKAN PELATIHAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

25 Februari 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 1006

Surabaya, 26 Februari 2024 – Guna meningkatkan pengetahuan dalam menerapkan substansi dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pola investasi maka BPSDM menyelenggarakan Pelatihan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dilaksanakan dan dibuka pada Senin (26/2).

Dalam sambutan pembukanya, Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah VI Surabaya Diki Zukarnaen menyampaikan, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ini menjadi salah satu solusi yang efektif dalam pemenuhan financial gap, percepatan penyediaan infrastruktur yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan wilayah, serta dalam pemanfaatan nilai uang (value for money)."

Selanjutnya, Diki Zukarnaen mengharapkan bahwa para peserta pelatihan dapat menaati tata tertib selama pelatihan serta serius dan disiplin dalam belajar agar pelatihan ini dapat berjalan dengan maksimal dan mencapai tujuan awal.

Pelatihan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dilaksanakan pada 26 Februari s.d 1 Maret 2024 selama 33 JP. Pelatihan yang dilaksanakan secara distance ini diikuti oleh 40 peserta.

210 PESERTA IKUTI PELATIHAN BELA NEGARA BAGI KASATKER, PPK DAN POKJA PBJ

26 Februari 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 1045

Bandung, 26 Februari 2024 – Dalam menjaga kualitas infrastruktur guna mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan produktif dibutuhkannya sumber daya yang tangguh, tidak hanya dari segi intelektualitas tetapi juga ketangguhan fisik dan mental.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Pelatihan Bela Negara bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang resmi dibuka oleh Pjt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, Dadang Rukmana di Pusat Pendidikan Kaveler.

Dalam sambutannya, Dadang Rukmana menyampaikan, "Seluruh insan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus mempunyai nilai-nilai I-PROVE (Integritas, Profesional, Visioner, dan Beretika Akhlakul Karimah) dalam setiap langkahnya. Termasuk ujung tombak Kementerian PUPR yakni, Kasatker, PPK dan Pokja PBJ."

Dadang Rukmana juga menyampaikan bahwa Insan PUPR harus mampu menjalankan core value ASN yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

Pelatihan bela negara ini dilakukan selama 15 hari mulai tanggal 22 Februari hingga 7 Maret 2024. Pelatihan ini bermaksud untuk membangun rasa cinta tanah air, kerjasama, loyalitas, daya juang, serta ketahanan fisik dan mental. Pelatihan bela negara diikuti oleh 210 peserta.

Turut hadir dalam pembukaan pelatihan yakni Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Inspektur I, Inspektur IV, Inspektur VI, Sekretaris Ditjen SDA, Sekretaris Ditjen Bina Marga, Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Sekretaris Ditjen Perumahan, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi, dan Pjt. Sekretaris BPSDM.

WUJUDKAN SDM BERDAYA SAING TINGGI, BPSDM SELENGGARAKAN PELATIHAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA

27 Februari 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 1017

Palembang, 26 Februari 2024 – Guna menciptakan Pembina Jasa Konstruksi yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai jenjangnya, sehingga benar-benar mampu membina dan meningkatkan kualitas sumber daya konstruksi, BPSDM Kementerian PUPR menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Tahun 2024 dibuka pada Senin (26/2) di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang.

Dalam sambutan pembukanya, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daudi menyampaikan, "Di tengah semangat dan harapan yang tinggi terhadap fungsi dan eksistensi pejabat fungsional khususnya Jabatan Fungsional Pembina Jasa konstruksi, diperlukan pembinaan serta pengelolaan jabatan fungsional, salah satunya melalui pengembangan kompetensi bidang Pembinaan Jasa Konstruksi sehingga memiliki daya saing, berkinerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan terbaik."

Pelatihan ini bertujuan agar peserta mampu memahami kebijakan terkait penyelenggaraan jabatan fungsional dan dasar-dasar pelaksanaan sebagai Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.

Pelatihan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama dilaksanakan pada tanggal 26 Februari hingga 29 Februari 2024 dengan metode pelatihan pola secara Klasikal selama 36 Jam Pelatihan dan diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari unit organisasi.

32 PESERTA LULUS PELATIHAN HUKUM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DI BAPEKOM PUPR WILAYAH IX JAYAPURA

29 Februari 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 1005

Jakarta, 28 Februari 2024 – Terbitnya penyelenggaraan konstruksi merupakan salah satu faktor pendukung kelancaran pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan pemerintah. Maka, Pelatihan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi (HKKK) diadakan secara daring oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen di Jakarta sejak 19 Februari lalu hingga ditutup pada Rabu (28/2).

Dalam sambutan penutup pelatihan, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen diwakili Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Catherine I. Sihombing menyampaikan harapannya kepada 32 orang peserta yang lulus. "Setelah lulus pelatihan ini, diharapkan peserta mampu melaksanakan kontrak kerja konstruksi dan memahami prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi, sesuai dengan tujuan pelatihan, sehingga dapat melaksanakan tugas tersebut secara lebih profesional."

Jaminan kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalani hak dan kewajibannya juga tentu perlu diwujudkan. Mengingat hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Diantara 32 orang peserta yang lulus 3 orang peserta berhasil meraih predikat peserta terbaik. Terbaik pertama diraih Bilal Ibrahim Usu dari Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, terbaik kedua Muhammad Sulthoni Rahman dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Utara Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan terbaik ketiga Ratmasari Anggaraningih dari Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Manfaat mengikuti pelatihan ini dirasakan oleh salah satu peserta Ratmasari. "Dengan mempelajari hukum kontrak konstruksi ini maka saya bisa memastikan kaidah-kaidah kontrak yang benar sudah tercantum dalam dokumen. Secara tidak langsung, jika ada penugasan atau disposisi dan pimpinan yang memerlukan telaah terkait hukum kontrak konstruksi, maka saya bisa memberikan hasil telaahan yang optimal sesuai dengan aturan perundangan karena telah mengikuti pelatihan ini," ujar Ratmasari.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Kompetensi PUPR Wilayah IX Jayapura ini berlangsung selama delapan hari dengan 30 jam pelajaran. Para Widayawati dan Tenaga Ahli yang berpengalaman dan kompeten pada bidangnya memberikan paparan secara daring melalui konferensi video.

27 PESERTA LULUS PELATIHAN PEMBINA JASA KONSTRUKSI DI BAPEKOM PUPR WILAYAH II PALEMBANG

01 Maret 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 74

29 Februari 2024 - BPSDM telah menyelesaikan Pelatihan Pembina Jasa Konstruksi Angkatan I Tahun 2024 yang dilaksanakan sejak tanggal 26 Februari sampai dengan 29 Februari 2024 di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang.

Pelatihan tersebut bertujuan supaya peserta mampu memahami kebijakan terkait penyelenggaraan jabatan fungsional dan dasar-dasar pelaksanaan sebagai Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.

Adapun peserta Pelatihan Pembina Jasa Konstruksi yang dinyatakan lulus sebanyak 27 orang, 3 terbaik diantaranya; Natalison Layuk Rambung, S.ST, dari BP2IK Wilayah Papua Barat dengan nilai 92.07 dan predikat Sangat Memuaskan; Dicky Vito Aryanto, S.T, dari BJKW VII Jayapura dengan nilai 89.58 dan predikat Memuaskan; I Gede Wana Wedastra S.T, dari BJKW VI Makassar dengan nilai 89.23 dan predikat Memuaskan.

"Melalui pelatihan ini saya menyadari bahwa kita sebagai ASN harus bisa agile atau mampu menyesuaikan kinerja sesuai ekspektasi dan tujuan organisasi dimanapun ditempatkan," ungkap Natalison Layuk Rambung.

Kepala Pusbangkom Manajemen Moeh Adam, MM resmi menutup pelatihan pada hari Kamis (29/02) dengan menyampaikan harapannya kepada para peserta agar nantinya dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat sehingga bermanfaat bagi unit kerja dalam memenuhi sasaran strategis penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan juga bagi individu sebagai pejabat fungsional.

BPSDM WUJUDKAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN HANDAL MELALUI PELATIHAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN SDM

01 Maret 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 27

Surabaya, 4 Maret 2024, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyelenggarakan Pembukaan Pelatihan Manajemen Pengembangan SDM secara distance learning. Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.

Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan memahami pengetahuan tentang konsep pengembangan ASN serta kebijakan dan strategi pengembangan ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga mampu menjadi pengelola kepegawaian yang handal.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Moeh Adam menyampaikan harapannya terhadap para peserta pelatihan "Agar para peserta pelatihan dapat memiliki wawasan baru, serta pemahaman yang sama mengenai kebijakan, strategi hingga implementasi pengembangan SDM di lingkungan Kementerian PUPR."

Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 4 Maret sampai dengan 8 Maret di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR wilayah VI Surabaya yang dilakukan selama 38 JP Jam pelajaran 45 menit dan dihadiri oleh 40 peserta pelatihan.

PENUTUPAN PELATIHAN BELA NEGARA BAGI KASATKER, PPK DAN POKJA PBJ ANGKATAN III, KEMENTERIAN PUPR: JAGA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

13 Maret 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 28

Bandung - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zaini Fatah secara resmi menutup Pelatihan Bela Negara bagi Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Kepala Pembuat Komitmen (PPK), dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (POKJA PBJ) Angkatan III Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Kavelan (Pusdikav), Bandung, Kamis (07/03/2024).

Sekjen PUPR Zaini Fatah mengatakan, pelatihan Bela Negara yang telah dilaksanakan selama 14 hari ini adalah untuk membangun rasa cinta tanah air, kejuangan, loyalitas, daya juang, serta ketahanan fisik dan mental.

"Kementerian PUPR memiliki tugas penyelenggaraan infrastruktur yang berperan sangat penting untuk mengubah peradaban, meningkatkan daya saing, mengukuhkan keadilan sosial, serta persatuan dan kesatuan bangsa," kata Sekjen Zaini Fatah.

Sekjen Zaini Fatah kemudian mengingatkan kembali kepada para peserta Bela Negara mengenai pesan Presiden Jokowi dalam penyerahan DIPA 2024:

"Pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Kedua, kelola anggaran dengan penuh transparansi dan akuntabilitas, serta jangan membuka celah sedikitpun untuk korupsi. Ketiga, percepat realisasi anggaran dengan orientasi pada hasil dan manfaat maksimal bagi rakyat," jelasnya.

Sekjen Zaini Fatah menyampaikan ucapan selamat dan berpesan kepada para Kasatker, PPK dan POKJA PBJ yang telah selesai melaksanakan pelatihan Bela Negara untuk tetap menjaga sinergitas dan kerjasama yang telah ditempa dan dilatih pada Bela Negara.

"Saudara sekalian yang hadir di sini adalah para Kasatker, PPK dan Pokja PBJ yang merupakan ujung tombak Kementerian PUPR untuk mencapai target pembangunan infrastruktur yang amanat. Jadi setiap tugas negara sebagai amanat, niat memberikan yang terbaik pada organisasi dan bangsa," pesan Sekjen Zaini Fatah.

Pada kesempatan ini, Sekjen Zaini Fatah juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada TNI AD, khususnya Komandan Pusat Pendidikan Kavelan Brigjen TNI Tatang Sudirman beserta jajarannya, atas dukungan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan Pelatihan Bela Negara bagi Kasatker, PPK, dan Pokja PBJ Angkatan III Tahun 2024 ini.

Turut hadir dalam kegiatan penutupan ini, para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR.

KEMBANGKAN ESTIMATOR PEKERJAAN KONSTRUKSI, BPSDM SELENGGARAKAN PELATIHAN DI BAPEKOM PUPR WILAYAH IX JAYAPURA

16 Maret 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 9

Jayapura, 14 Maret 2024 – Penerapan tugas dan tanggung jawab sebagai Estimator Pekerjaan Konstruksi perlu dikembangkan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Jabatan. Maka, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IX Jayapura mengadakan Pelatihan Estimasi Biaya Konstruksi secara daring pada Kamis (14/03).

"ASN PUPR itu harus cermat dan teliti pada saat proses perhitungan, mulai dari perencanaan, sampai dengan pengawasan, dan pelaksanaan. Terutama pada saat perencanaan, mulai dari perhitungan terkait dengan harga satuan dasar upah, harga satuan dasar alat, harga satuan dasar bahan, keakuratan ini sangatlah penting," ucap Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Pusbangkom Manajemen RJ, Catherine I. Sihombing, saat membuka pelatihan secara resmi.

Catherine juga menambahkan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan konstruksi harus bermanfaat dan ada keberlanjutannya.

Hingga 27 Maret 2024 mendatang, 28 peserta akan menjalani Kelas Virtual, Asynchronous dan tatap muka sebanyak 74 jam pelajaran. Sebelum dan setelah melaksanakan pelatihan, peserta akan diberikan pre test dan post test untuk mengukur efektifitas pembelajaran dan peningkatan pengetahuan mereka. Tenaga pengajar meliputi Narasumber, Pejabat Struktural, Praktisi, dan Widyaiswara BPSDM Kementerian PUPR.

BPSDM ADAKAN PELATIHAN INOVATIF PENGELOLAAN ANGGARAN UNTUK ASN PUPR DI BAPEKOM PUPR WILAYAH II PALEMBANG

18 Maret 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 11

Palembang, 18 Maret 2024 - Kapasitas pengetahuan dan keterampilan ASN yang menangani kegiatan kesatkeran dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus ditingkatkan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen mengadakan Pelatihan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 pada Senin (18/03).

"Peserta diharapkan dapat mengikuti pelatihan ini dengan serius dan bukan hanya karena penugasan semata, tetapi didasari oleh keinginan diri sendiri untuk mengembangkan kompetensi diri sendiri," ucap Kepala Pusbangkom Manajemen Moeh. Adam dalam pidatonya ketika membuka pelatihan secara resmi.

Pelatihan Pelaksanaan Anggaran ini akan dilakukan secara virtual dengan diskusi, dan praktik selama 49 JP. Dalam pelaksanaannya Bapekom PUPR Wilayah II Palembang sebagai penyelenggara juga melibatkan tenaga kerja yang meliputi para Widyaiswara, Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, dan KPPN Palembang.

Sebanyak 35 peserta akan melaksanakan pelatihan mulai dari tanggal 18 Maret - 27 Maret 2024 secara hybrid di Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PUPR Wilayah II Palembang.

Pelatihan ini menggabungkan teori dan praktik, diantaranya materi terkait Core Values Berahlak, dan Manajemen Risiko Dasar; Budaya Anti Korupsi; Pengantar Kebijakan Pelaksanaan Anggaran; Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan; Kodefikasi Bagan Akun Standar (BAS) dan Standar Biaya (SB); Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa; Tata Cara Pemrosesan Verifikasi Tagihan; Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA); Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran (EMON); dan Penatausahaan Pajak. Pada saat praktik, peserta akan melakukan Praktik dan Aplikasi Pelaksanaan Anggaran (SAKTI); Studi Kasus Pelaksanaan Anggaran, dan ditutup dengan Seminar hasil Studi Kasus.

SIMANTU TALKSHOW EP. 32 : CERMAT DALAM SWAKELOLA PEKERJAAN KONSTRUKSI

20 Maret 2024 / BPSDM Kementerian PUPR 24

Jakarta, 19 Maret 2024 – Swakelola adalah praktik di mana suatu organisasi atau entitas, seperti pemerintah atau perusahaan, memilih untuk melakukan pengelolaan dan pelaksanaan suatu proyek atau kegiatan secara internal tanpa melibatkan pihak ketiga atau kontraktor eksternal. Membahas lebih lanjut mengenai Swakelola Pekerjaan Konstruksi maka BPSDM menyelenggarakan Simantu Talkshow Episode 32.

Dalam kegiatan Talkshow Episode 32 ini menghadirkan Praktisi Muazzin sebagai narasumber dan dimoderatori oleh Adestya B.H Putra. Muazzin menyampaikan bahwa alasan utama unit kerja atau unit organisasi memilih pekerjaan secara swakelola, yang pertama karena barang/jasa tersebut memenuhi kriteria untuk diswakelola. Yang kedua adalah unit kerja atau unit organisasi tersebut memiliki sumber daya. Yang ketiga tentunya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya unit kerja yang bersangkutan.

"Berkaitan dengan faktor-faktor kunci yang menjadi pertimbangan dalam swakelola pekerjaan konstruksi yaitu dari administrasi dan persiapan swakelola. Di dalam perencanaan swakelola itu ada penyusunan perkiraan biaya, perkiraan biaya ini tidak disusun oleh unit perencana tetapi langsung disusun oleh tim persiapan. Seharusnya memang disusun oleh unit perencanaan. Selanjutnya, pengadaan bahan material, peralatan yang berkaitan dengan swakelola ini dilakukan sendiri oleh tim pelaksana, yang seharusnya tetap melalui proses yang dilakukan oleh pejabat pengadaan atau Pokja."

Dalam sesi tanya jawab, beberapa partisipan secara aktif mengajukan pertanyaan, salah satu pertanyaan yaitu mengenai solusi atas pencegahan risiko atau tantangan khusus dalam perencanaan, penyelenggara, dan prosedur. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu menetapkan tipe swakelola yang tepat. Berikutnya yang tidak kalah penting, menyusun spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja yang tepat. Yang terakhir yaitu dalam menyusun perkiraan biaya.

Salah satu kelebihan dalam pelaksanaan secara swakelola adalah ketika ada kegiatan atau kejadian yang mendadak, seperti longsor, menutup badan jalan, menutup aliran sungai, tentu akan lebih praktis dilakukan swakelola. Sedangkan, kekurangan swakelola adalah di tengah kesibukan tugas dan fungsi, fokus mungkin akan terbagi dibandingkan dikerjakan dengan penyedia jasa.

Terakhir, menurut Muazzin, pihak swasta boleh menjadi bagian dari tim swakelola dengan mekanisme pengadaan langsung.

Gambar 44 - Tangkapan Layar Berita di website BPSDM Januari-Maret

BAB III

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam periode bulan Januari-Maret 2024, Layanan Informasi Publik Pusbangkom Manajemen perlahan melengkapi seluruh poin daftar informasi yang wajib disediakan melalui website BPSDM dan juga PUPR. Beberapa kendala yang menjadi perhatian kami, antara lain:

- a. Penutupan media sosial Pusbangkom Manajemen yang sebelumnya menjadi salah satu sarana utama pelayanan permohonan informasi publik menyebabkan sedikitnya permohonan yang dilayani; dan
- b. Kurangnya koordinasi terkait perubahan jadwal kegiatan pada beberapa waktu.

Berbagai permasalahan tersebut di atas perlu diatasi dengan rencana tindak lanjut sehingga layanan informasi publik Pusbangkom Manajemen dapat berjalan secara optimal.

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka perbaikan layanan informasi publik Pusbangkom Manajemen, disusun beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut, yaitu:

- a. Koordinasi dengan PPID Utama mengenai mekanisme permohonan informasi melalui e-PPID; dan
- b. Meningkatkan frekuensi konfirmasi jadwal kegiatan dengan subkoor kegiatan terkait.

Evaluasi kegiatan PPID Pusbangkom Manajemen yang diterjemahkan melalui laporan Triwulan ataupun Tahunan diperuntukkan agar kualitas layanan PPID meningkat. Peningkatan kualitas layanan PPID Pusbangkom Manajemen terlihat dari penghargaan sebagai “Pelaksana PPID Terbaik Tingkat Pusat Tahun 2021”.



Gambar 45 - Pigam dan Sertifikat Penghargaan PPID
Pusbangkom Manajemen